

BAB III

PEMBAHASAN

1. Representasi Perempuan Didalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Sleman

Perjuangan kaum agar bisa mendapatkan haknya yang bersifat sementara didalam bidang politik (*affirmative action*) telah tercapai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang dijelaskan secara implisit dalam Pasal 65 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Didalam pasal tersebut mewajibkan setiap partai yang menjadi peserta pemilu mencalonkan kandidat perempuan sebanyak 30%, jika tidak mencapai kuota yang telah ditentukan tersebut maka secara otomatis partai tersebut akan gagal dan tidak bisa ikut didalam pemilihan umum. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya memberikan manfaat yang sangat menguntungkan bagi perempuan, karena akan meningkatkan partisipasi perempuan didalam politik dan juga memberikan peluang yang lebih besar untuk perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Tingkat representasi perempuan di Kabupaten Sleman dalam pemilihan umum terkhusus di pemilihan calon legislatif, dalam tiga periode terakhir selalu meningkat. Pada tahun 2009 terdapat 10 kursi yang diperoleh oleh perempuan atau sekitar 20%, di periode selanjutnya yaitu tahun 2014 meningkat kembali menjadi 12 kursi atau sekitar 24%. Dan yang terakhir pemilihan umum yang baru saja dilakukan yaitu periode 2019 representasi perempuan didalam Pemilihan Umum ini kembali meningkat menjadi 13 kursi atau sekitar 26%. Meskipun jumlah tersebut belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan yang

berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sleman. Namun, hal tersebut sudah menjadi pencapaian yang sangat baik karena mampu meningkatkan jumlah keterwakilan tersebut. Meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan yang ikut didalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman ini dapat dikatakan akibat dari ketentuan kebijakan kuota 30% perempuan di wilayah politik. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu pengurus Partai Nasdem:

“Peraturan yang telah ditentukan setiap partai harus memenuhi kuota 30% untuk dapat ikut serta didalam pemilu 2019 ini, selain itu juga tingkat kesadaran perempuan untuk terjun didalam politik sudah meningkat. Dapat dilihat bahwa partai tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota 30% untuk perempuan tersebut”(Wawancara,13 November 2019).

Namun berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh salah satu calon legislatif dari partai kebangkitan bangsa:

“Kuota 30% bagi saya itu sangat kurang, keinginan saya perempuan memiliki kuota yang sebanding dengan laki-laki yaitu minimal 50%, tetapi pada faktanya untuk memenuhi kuota 30% itu terkadang merasa kesulitan. Sehingga partai mengambil kandidat hanya untuk memenuhi kuota 30% saja.” (Wawancara, 6 November 2019).

Berikut nama-nama calon legislatif perempuan yang berhasil lolos menjadi anggota DPRD

Kabupaten Sleman periode 2019-2024:

Tabel 3.1 Calon Legislatif Perempuan Yang Berhasil Lolos Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sleman Periode 2019-2024

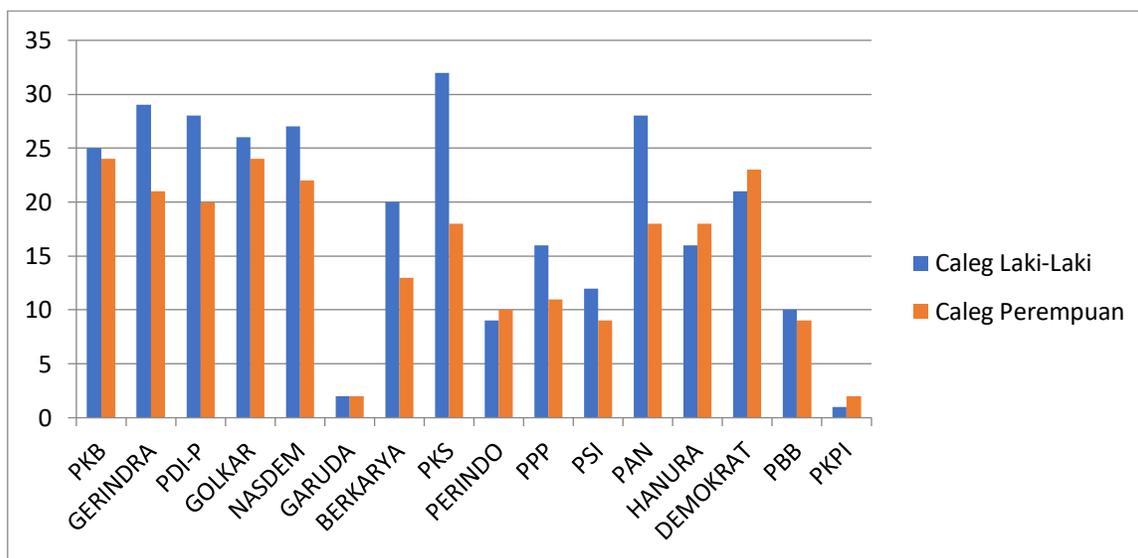
No.	Nama	Jabatan	Asal Partai
1.	Ani Maeranti,ST	Ketua Komisi A	PKB
2.	Rahayu Widi Nuryani,SH.,MH	Anggota Komisi C	PKB
3.	Rahayu Widi Cahyani, SH.,MH	Sekretaris Komisi B	PKB
4.	Happy Brilliant Srikandy	Anggota Komisi A	Gerindra
5.	Tri Mulia Wijayanti S.ST	Anggota Komisi D	Gerindra
6.	Dara Ayu Suharto,SH	Anggota Komisi B	Gerindra
7.	B. Ari Murruti, SE	Anggota Komisi B	PDIP
8.	Nila Rifianti,S.Pd	Anggota Komisi C	PDIP
9.	Benedicte Rury Tyas Pramuri, SE	Anggota Komisi D	PDIP
10.	Sri Riyadiningsih, S.Pd	Anggota Komisi A	PDIP
11.	Hj. Ismi Sutarti,SH	Anggota Komisi C	Nasdem
12.	Hj. Sumaryatin,S.Sos.,MA	Anggota Komisi A	PKS

13.	Fika Chusul Chotimah,SH	Anggota Komisi D	PPP
-----	-------------------------	------------------	-----

Sumber: dprd.slemankab.go.id 2019 (Data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 13 perempuan yang lolos didalam pemilihan umum dan mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sleman, 3 perwakilan dari PKB, 3 perwakilan dari Gerindra, 4 perwakilan dari PDIP yang merupakan perwakilan terbanyak, kemudian 1 Perwakilan dari Nasdem, PKS dan juga PPP. 7 dari 13 perwakilan merupakan calon legislatif incumbent dan 6 lainnya adalah orang-orang baru yang diusung oleh partai untuk ikut serta dalam pemilihan umum DPRD Kabupaten Sleman dan berhasil mendapatkan kursi.

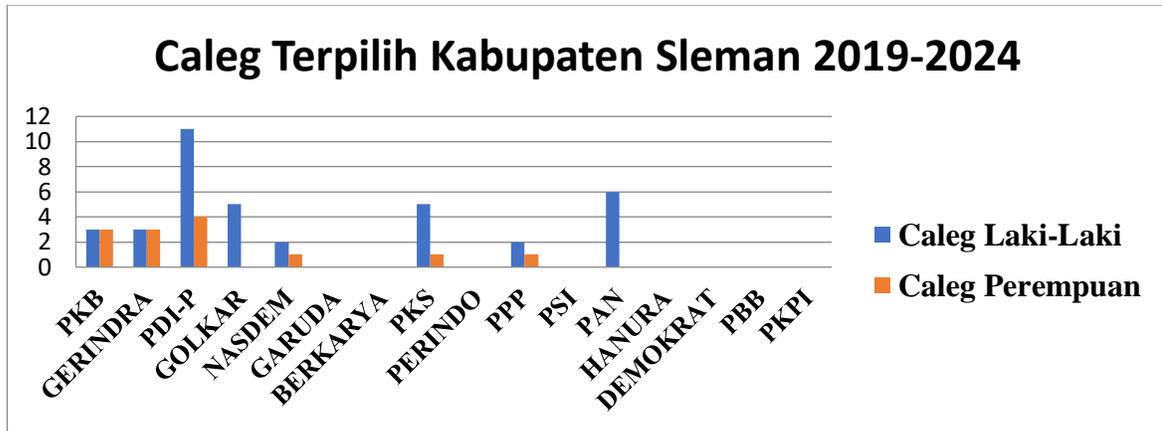
Dibawah ini merupakan grafik perbandingan antara calon legislatif perempuan dan laki-laki dari keseluruhan partai yang mengikuti pemilu 2019 di Kabupaten Sleman :



Gambar 3.1 Perbandingan Antara Calon Legislatif Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Sleman

Sumber: dprd.slemankab.go.id 2019 (Data diolah)

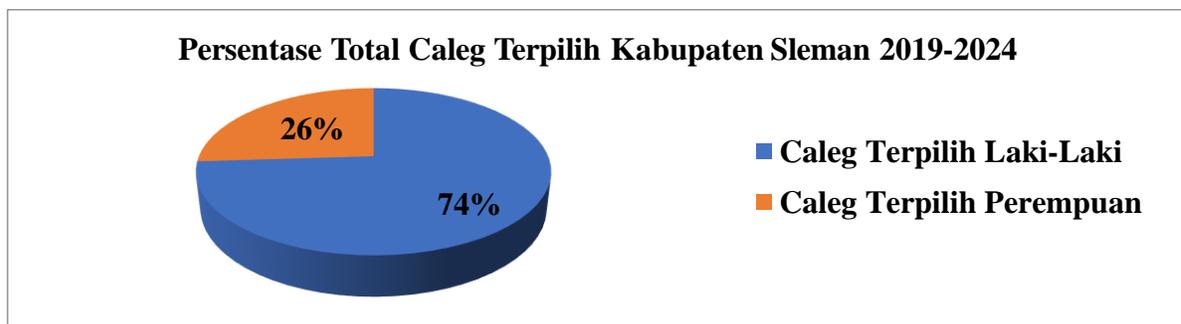
Dibawah ini merupakan grafik perbandingan antara calon legislatif perempuan dan laki-laki dari keseluruhan partai yang berhasil lolos dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024 :



Gambar 3.2 Caleg Terpilih Kabupaten Sleman 2019-2024

Sumber: dprd.slemankab.go.id 2019 (Data diolah)

Dari dua grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam pencalonan caleg perempuan semua partai sudah memenuhi persyaratan yaitu memasukkan 30% kuota perempuan bahkan ada beberapa partai yang melebihi dari 30%, namun jika dilihat dari grafik selanjutnya bahwa hanya 4 dari 8 partai yang mampu memenuhi kuota 30% perempuan didalam keterpilihan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sleman. Partai yang mampu memenuhi kuota 30% tersebut adalah partai Gerindra, PPP, PKB dan juga Nasdem. 4 partai lainnya yaitu PAN, PDIP, PKS, dan Golkar belum mampu memenuhi kuota 30% dalam keterpilihan perempuan. Berikut ini merupakan persentase perbandingan antara anggota DPRD perempuan yang terpilih dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman:



Gambar 3. 3 Persentase Total Caleg Terpilih Kabupaten Sleman 2019-2024

Sumber: dprd.slemankab.go.id 2019 (Data diolah)

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterwakilan Perempuan didalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman

2.1 Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial menjadi salah satu modal yang harus dimiliki oleh calon legislatif untuk dapat lolos dan mendapatkan kursi di DPRD, modal sosial meliputi beberapa cakupan, yaitu:

a. Jaringan (dalam dan luar negeri)

Jaringan merupakan salah satu indikator yang ada didalam modal sosial, jaringan yang dimaksud adalah berupa relasi dengan masyarakat dan dengan orang-orang yang berpengaruh yang dapat mendukung agar calon legislatif memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat terpilih. Kemudian jaringan ini berfungsi untuk memberikan bantuan kepada caleg agar dapat terpilih. Contohnya calon legislatif dari partai Nasdem ibu Ismi dimana caleg tersebut sudah memiliki relasi dengan masyarakat yang dibangun melalui kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan seperti pengadaan pemeriksaan kesehatan gratis, penjangkaran aspirasi masyarakat, dan juga senam bersama. Dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan tersebut beliau dapat menjalin relasi dengan masyarakat untuk mencari dukungan dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipercaya dapat memobilisasi massa. Caleg tersebut memiliki orang-orang kepercayaan untuk membantu dalam memobilisasi massa, disetiap kegiatan yang diadakan caleg memerintah orang kepercayaan tersebut untuk membawa beberapa orang yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai massa pendukung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut disaksikan dan dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung, dimana hal tersebutlah yang memberikan dampak positif dimana akhirnya masyarakat bisa menentukan pilihan. Selain dari relasinya dengan masyarakat sekitar, relasi dari partai sendiri juga sangat mendukung. Dimana caleg tersebut merupakan

caleg yang aktif di kegiatan kepartaian dan memiliki jabatan dipartai yang kemudian hal tersebut menjadi faktor pendukung keterpilihan caleg tersebut. Dengan adanya hubungan yang baik dengan petinggi-petinggi yang berada di partai menjadikan petinggi partai tersebut memberikan dukungan secara penuh untuk membantu keterpilihan caleg tersebut. Selain adanya relasi dengan masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan, kekuatan relasi pendukungnya juga terdapat pada mesin partainya bekerja. Dukungan partai tersebut dapat ditunjukkan dengan menjadikan caleg tersebut menjadi satu-satunya caleg perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif yang berasal dari partai nasdem. Kerjasama yang baik dan relasi yang luas yang akhirnya menghasilkan keterpilihan tersebut.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai nasdem, ibu Ismi Surtati:

“Modal sosial sangat dibutuhkan, karena sistem pemilihan umum saat ini menggunakan sistem pemilu langsung. Dimana masyarakat memilih secara langsung dan caleg harus mendapatkan suara terbanyak untuk lolos dan mendapatkan kursi di DPRD. Caleg harus memiliki jaringan yang luas untuk mendapatkan jumlah suara yang banyak tersebut.” (Wawancara, 16 November 2019)

b. Faktor Jaringan Keluarga

Dari beberapa responden yang telah di wawancarai oleh penulis mengatakan bahwa keluarga merupakan faktor yang sangat penting. Karena ketika perempuan telah memutuskan untuk terjun ke dunia politik maka perempuan tersebut harus siap untuk menerima segala resiko termasuk resiko untuk menghabiskan waktunya mengurus urusan politik. Ketika caleg perempuan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga maka caleg akan merasa kesulitan untuk membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaannya. Jaringan keluarga dibutuhkan untuk mengumpulkan suara terbanyak agar bisa terpilih dan lolos menjadi anggota legislatif. Dukungan jaringan keluarga

memberikan banyak keutungan bagi calon legislatif, terutama bagi caleg-caleg yang mengalami kelemahan dalam modal ekonomi. Namun, jaringan keluarga ini juga harus didukung oleh jaringan-jaringan lainnya. Karena, jika dengan mengandalkan jaringan keluarga saja caleg memiliki peluang yang kecil untuk menang. Hal ini disebabkan karena, setiap caleg pasti memiliki jaringan keluarga dan terkadang suara keluarga tersebut menjadi terbagi demi adanya keadilan. Jaringan keluarga ini tidak bisa dijadikan satu-satunya fondasi untuk bisa lolos menjadi anggota legislatif karena pada kenyataannya caleg lain juga melakukan hal yang sama.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai kebangkitan bangsa, Ibu Rahayu

Widi Nuryani:

“Dukungan keluarga itu sangat penting, jika tidak ada dukungan dari keluarga maka caleg akan merasa kesulitan. Karena, di politik tidak seperti kerja biasa yang hanya siang saja atau sore saja. Caleg harus siap bekerja selama 24 jam, ketika sudah memutuskan untuk mencalonkan diri maka sudah tidak bisa setengah-setengah.” (Wawancara, 6 November 2019)

Hasil wawancara dengan pengurus partai demokrasi Indonesia perjuangan, Bapak

Supriyoko:

“Perempuan jika ingin terjun ke dunia politik maka harus mendapatkan izin dari suami dan keluarganya, dari PDIP sendiri mengalami sedikit kendala mengenai izin keluarga ini, namun kita terus memberikan pemahaman-pemahaman tentang politik kepada keluarga dan akhirnya kendala tersebut bisa teratasi.” (Wawancara, 22 November 2019).

Hasil wawancara dengan pengurus partai nasdem, Bapak Dwi Yulianta sebagai

Sekretaris PDP Nasdem:

“Perempuan itu memiliki ranah privat yaitu keluarga, yang terkadang mengganggu ranah publiknya. Dan kita sebagai orang partai tidak bisa mengganggu ranah tersebut.” (Wawancara, 13 November 2019).

c. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat

Kekuatan pengaruh dalam masyarakat dapat diartikan sebuah tindakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan, hal ini menjadi berpengaruh karena dengan sistem pemilu terbuka seperti saat ini mengharuskan caleg mendapatkan suara terbanyak untuk dapat lolos menjadi anggota legislatif, suara terbanyak tersebut ditentukan oleh masyarakat dimana masyarakatlah yang akan memilih caleg untuk kemudian menang dan menjadi anggota legislatif. Sehingga caleg harus memperhatikan apa saja yang telah dilakukannya untuk dapat menarik minat masyarakat untuk akhirnya memilih caleg tersebut. Contohnya calon legislatif perempuan dari partai PKB Ibu Rahayu Widi. Beliau dalam lingkungan masyarakat ikut ke dalam organisasi kepengurusan organisasi muslimah partai PKB dimana diorganisasi tersebut beliau ikut menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan dari organisasi tersebut, dengan pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh caleg tersebut memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya kepada Ibu Rahayu. Dimana beliau dianggap telah banyak memberikan dampak positif melalui pemikiran-pemikiran dan keputusan-keputusan yang diambil untuk kemajuan dari organisasi muslimah tersebut. Pengaruh dalam masyarakat ini kemudian menjadi penilaian bagi masyarakat, ketika caleg mampu memberikan pengaruh yang baik maka akan menimbulkan kepercayaan dan ketertarikan masyarakat untuk memilih caleg tersebut.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai kebangkitan bangsa, Ibu Rahayu Widi

Nuryani:

“Sebagian besar calon legislatif memang harus diawali dengan adanya modal sosial, setiap caleg harus memiliki jaringan. Kekuatan pengaruh dalam masyarakat ini sangat berpengaruh karena yang memilih kita adalah masyarakat maka kita harus melihat pengaruh apa saja yang telah kita berikan kepada masyarakat. (Wawancara, 6 November 2019).

d. Pengurus organisasi

Pengurus organisasi menjadi berpengaruh karena caleg dapat bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat ditambah lagi jika organisasi yang diikuti tersebut adalah organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Dengan menjadi pengurus organisasi, terlebih organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat menjadikan caleg lebih dikenal oleh masyarakat. Dapat dilihat bahwa kenyataan yang saat ini ada dimasyarakat, dimana kebanyakan masyarakat memilih caleg yang memang sudah dikenal. Dengan aktifnya caleg di organisasi maka akan semakin banyak masyarakat yang mengenal caleg tersebut. Dengan menjadi pengurus organisasi caleg bisa mendapatkan berbagai keuntungan dimana biasanya partai banyak merekrut caleg dari organisasi-organisasi yang ada baik itu organisasi sayap partai ataupun organisasi kemasyarakatan, kemudian caleg-caleg yang menjadi pengurus organisasi memiliki pengalaman yang lebih banyak, baik itu pengalaman bekerjasama didalam tim, berbicara didepan orang banyak, membangun relasi dengan orang-orang berpengaruh, dan juga pengalaman lainnya. Caleg yang menjadi pengurus organisasi dianggap memiliki nilai tambah dibandingkan dengan caleg-caleg yang tidak mengikuti organisasi. Caleg-caleg yang sudah lebih dahulu menjadi pengurus organisasi atau berpengalaman dibidang kemasyarakatan dianggap lebih “terlatih” atau lebih memiliki pengalaman dan jam terbang yang lebih tinggi. Sehingga harapan tersebut dijadikan tolak ukur apakah caleg tersebut berkompeten atau tidak. Masyarakat pastinya akan lebih memilih caleg yang memiliki riwayat menjadi pengurus organisasi karena dianggap lebih berkompeten dan memiliki nilai tambah untuk kemudian dipilih menjadi anggota legislatif. Selain itu, caleg yang menjadi pengurus partai juga memiliki nilai tambah

tersendiri. Penentuan nomor urut caleg salah satunya juga dinilai dari apakah caleg tersebut merupakan pengurus partai atau tidak, sudah berapa lama caleg tersebut mengabdikan dipartai, apa saja yang telah dilakukan oleh caleg tersebut untuk partai.

Hasil wawancara dengan caleg tidak terpilih dari partai Golkar, Ibu Sri Rejeki:

“Modal sosial memiliki pengaruh untuk terpilihnya calon legislatif untuk meraih kemenangan, namun hal tersebut harus diseimbangi dengan cost politik. Karena pada kenyataannya didalam pemilu 2019 ini banyak caleg yang terpilih karena politik transaksional/money politik.” (Wawancara, 12 November 2019).

Dari hasil wawancara beberapa responden, baik itu caleg yang terpilih maupun caleg yang tidak terpilih. Dapat diambil kesimpulan bahwa modal sosial merupakan modal yang penting dalam mempengaruhi keterwakilan perempuan didalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman. Dimana modal ini menduduki peringkat pertama yang sangat berpengaruh dalam keterwakilan dan juga keterpilihan caleg di pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sleman. Indikator yang sangat berpengaruh adalah jaringan dan kekuatan pengaruh didalam masyarakat. dimana jaringan bisa membantu caleg untuk mendapatkan dan mengumpulkan massa serta pengaruh didalam masyarakat mampu memberikan ketertarikan masyarakat untuk memilih caleg tersebut. Dilihat dari sistem pemilihan umum sekarang yang terbuka, caleg harus mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat lolos dan mendapatkan kursi di DPRD. Dua caleg terpilih dari partai PKB dan Nasdem mengandalkan modal sosial sebagai kekuatan utama dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman. Karena, dua caleg ini merupakan caleg incumbent dan sudah memiliki basis massa yang cukup banyak dibandingkan caleg yang tidak terpilih. Selain itu caleg dari partai Nasdem juga menjadi salah satu pengurus partai politik dan memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan, ini menjadi nilai tambah bagi caleg tersebut. Tetapi pendapat yang berbeda diberikan oleh

caleg dari Golkar dimana caleg tersebut mengatakan bahwa dengan tidak adanya basis massa namun memiliki modal ekonomi maka caleg memiliki peluang untuk terpilih dan lolos menjadi anggota DPRD.

2.2 Modal Politik (*Political Capital*)

Modal politik juga merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh caleg untuk bisa lolos dan mendapatkan kursi di DPRD, modal politik ini memiliki cakupan :

a. Pengalaman mengorganisasi massa

Pengalaman mengorganisasi massa juga merupakan indikator yang berpengaruh dalam keterpilihan calon legislatif perempuan, dimana massa adalah orang yang akan mendukung dan memilih caleg agar bisa lolos menjadi anggota legislatif. Pengalaman mengorganisasi massa ini menjadi penting karena aktivitas ini dilakukan untuk menghimpun massa untuk menambah kekuatan dan ketahanan, dimana semakin banyak massa yang dikumpulkan maka akan semakin besar peluang untuk lolos menjadi anggota legislatif. Untuk menarik massa caleg harus dapat diterima dulu oleh massa tersebut, biasanya untuk dapat diterima oleh masyarakat caleg akan melakukan berbagai cara salah satunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri untuk akhirnya massa menjadi tertarik dan mau ikut serta untuk mendukung terpilihnya caleg tersebut. Massa sendiri biasanya tidak bisa jika hanya satu kalangan saja, caleg harus menarik massa dari berbagai kalangan. Dan terbukti sampai sekarang bahwa penggalangan massa ini sampai sekarang terbukti efektif untuk meloloskan caleg menjadi anggota legislatif. Contohnya calon legislatif dari partai Nasdem, dimana caleg ini merupakan caleg incumbent. Ketika caleg ini masih menjabat sebagai anggota legislatif beliau sering mengadakan acara untuk menggalang massa, seperti acara pemeriksaan kesehatan gratis, acara kumpul warga untuk menjaring

aspirasi, acara senam bersama. Kegiatan yang dibuat tersebut akhirnya memberikan dampak yang sangat baik, dimana massa memiliki kepercayaan untuk memilih kembali calon legislatif agar dapat terpilih dan kembali menjabat sebagai anggota legislatif.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai nasdem, ibu Ismi Surtati:

“Modal politik sangat berpengaruh terhadap keterpilihan, karena saya sudah terpilih menjadi anggota legislatif sebanyak 3 (tiga) periode berturut-turut. Hal tersebut menjadikan saya lebih matang dari sisi apapun dalam berpolitik sehingga masyarakat bisa menilai kinerja saya selama terjun didunia politik.” (Wawancara, 16 November 2019).

b. Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik

Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik dapat dilakukan ketika caleg sudah menjadi anggota legislatif, ketika masih menjadi calon mereka belum memiliki hak untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan publik. Namun, pengambilan keputusan ini berpengaruh bagi caleg *incumbent* dimana terdapat rekam jejak. Ketika menjabat sebagai anggota legislatif dan sudah memiliki hak untuk mengambil keputusan lalu kemudian keputusan yang diambil tersebut ternyata salah atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat maka akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat untuk memilih caleg tersebut di pemilihan selanjutnya. Ketika masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan, maka akan berdampak pada keterpilihnya caleg tersebut di periode selanjutnya. Kemungkinan besarnya adalah caleg tersebut tidak akan terpilih kembali. Caleg harus mengambil keputusan politik dengan mempertimbangkan segala aspek, memikirkan dampak apa yang akan didapatkan ketika keputusan tersebut diambil. Jika keputusan tersebut kemudian membuat masyarakat merasa dirugikan maka hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pencalonan-pencalonan di periode selanjutnya. Caleg harus bisa adil dalam mengambil keputusan, dimana keputusan yang diambil harus pro pada

masyarakat, dimana kepentingan masyarakat harus menjadi hal yang sangat di prioritaskan. Caleg merupakan wakil rakyat maka dari itu keputusan-keputusan yang akan diambil oleh caleg ketika sudah resmi menjadi anggota legislatif haruslah atas pertimbangan kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat memilih calon legislatif yang mampu memperjuangkan hak-hak rakyat, dan mampu menerima serta mewujudkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai kebangkitan bangsa, Ibu Rahayu Widi Nuryani:

“Pengalaman di organisasi massa juga berpengaruh karena itu memiliki nilai tambahan tersendiri. Kekuatan dalam pengambilan keputusan politik jika diawal pencalonan belum dibutuhkan karena dari awal caleg masuk ke dalam dunia politik, caleg belum memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun, jika sudah lolos dan resmi menjadi DPRD hal tersebut bisa berpengaruh. Terakhir reputasi dan legitimasi itu berpengaruh hanya 50% saja.” (Wawancara, 6 November 2019).

c. Reputasi dan legitimasi

Reputasi merupakan tindakan sebagai sebab calon legislatif mendapat nama yang baik untuk menarik minat masyarakat untuk memilih, dengan reputasi yang baik maka calon legislatif memiliki nilai tambahan untuk menarik masyarakat. Hampir seluruh masyarakat pasti akan memilih caleg dengan reputasi yang bagus, reputasi ini menjadi pertimbangan masyarakat untuk menentukan kepantasan seseorang untuk menjadi wakil rakyat. Dimana jika kepantasan tersebut dianggap sudah memadai maka peluang caleg tersebut untuk dapat lolos menjadi lebih besar. Reputasi ini juga berkaitan dengan popularitas, dimana pada zaman milenial seperti saat ini popularitas menjadi hal yang cukup penting. Maka dari itu kebanyakan partai sekarang banyak mengusung caleg dari kalangan anak-anak muda dan juga publik figure. Dengan tingkat kepopuleran yang tinggi maka akan dapat menggalang pendapatan suara yang tinggi pula. Tidak dapat

dipungkiri dengan zaman yang seperti ini pemilih akan lebih memilih caleg-caleg dengan tingkat kepopuleran yang tinggi. Kebanyakan pemilih akan memilih caleg-caleg yang banyak dikenal oleh orang banyak. Caleg-caleg dengan reputasi yang baik atau tingkat popularitas yang tinggi memiliki daya tarik sendiri untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih caleg tersebut. Namun, reputasi dan tingkat popularitas tersebut juga harus diseimbangi dengan kompetensi yang memadai. Jika hanya mengandalkan reputasi yang baik dan tingkat popularitas yang tinggi namun tidak diseimbangi dengan kompetensi yang memadai, maka bisa menjadi alasan caleg tersebut gagal. Reputasi caleg pada saat ini juga didukung dengan semakin berkembangnya teknologi, dimana banyak caleg yang menggunakan media sosial untuk menunjukkan reputasi baiknya. Seperti contohnya caleg dari partai nasdem, yaitu ibu Ismi dimana caleg tersebut sering membagikan aktivitas di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat, beliau juga memberikan akses secara langsung kepada warga untuk menyampaikan aspirasinya melalui Whatsapp yang kemudian menjadikan masyarakat memiliki kepercayaan kepada beliau bahwa beliau mampu menjaring aspirasi masyarakat untuk kemudian diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan caleg tidak terpilih dari partai golkar, ibu Sri Rejeki:

“Modal politik ini bisa dikatakan penting dan tidak, karena tidak hanya dengan mengandalkan modal politik seorang caleg dapat terpilih. Karena, saat ini sistem yang sangat berpengaruh (sistem suara terbanyak) jadi modal politik ini juga harus diseimbangi dengan modal-modal lainnya agar caleg dapat terpilih menjadi anggota DPRD.” (Wawancara, 12 November 2019).

b. Caleg *Incumbent*

Selain faktor keluarga, faktor yang tak kalah penting dan berpengaruh adalah caleg incumbent. Dapat dilihat dari 13 caleg perempuan yang terpilih. Terdapat 7 caleg yang sebelumnya merupakan anggota legislatif Periode 2014-2019. Caleg incumbent ini

memiliki nilai tambahan tersendiri karena kebanyakan masyarakat sudah mengenal dan sudah memberikan kepercayaannya terhadap caleg-caleg yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota legislatif. Masyarakat sudah mengetahui bagaimana kinerja dari caleg *Incumbent* tersebut dan sudah tau apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat. sehingga, terkadang terdapat pula caleg *Incumbent* yang akhirnya tidak berhasil lolos di periode selanjutnya, karena masyarakat sudah mampu menilai apakah masih layak untuk dipilih kembali atau tidak. Selain itu Caleg incumbent juga sudah memiliki massa dan jaringan yang cukup banyak karena sudah terlebih dahulu terjun ke dunia pencalegan. Namun, hal tersebut tidak menjadikan caleg yang baru mencalonkan tidak bisa lolos menjadi legislatif. Dari data yang terdapat di web DPRD juga bisa dilihat bahwa ada beberapa caleg yang sebelumnya pernah terpilih namun di periode 2019-2024 ini tidak terpilih kembali.

Tabel 3.2 Caleg Perempuan *Incumbent*

No.	Nama Anggota DPRD	Partai Politik	Dapil
1.	Rahayu Widi Nuryani,S.H.,M.H	PKB	4
2.	Rahayu Widi Cahyani,S.H.,M.H	PKB	5
3.	Dara Ayu Suharto,S.H	Gerindra	5
4.	Nila Rifianti,S.Pd.	PDIP	3
5.	Hj. Ismi Sutarti,S.H.	Nasdem	5
6.	Sri Riyadiningsih,S.Pd	PDIP	5
7.	Fika Chusul Chotimah,S.H	PPP	5

Sumber: KPU DIY (Data diolah)

c. Sistem Pemilu

Untuk sistem suara terbanyak seperti yang diberlakukan sekarang juga menjadi faktor keterpilihan caleg perempuan, karena ternyata sistem nomor urut lebih menguntungkan bagi perempuan. Jika dengan sistem nomor urut perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos menjadi anggota legislatif. Selain itu dengan sistem terbuka dengan suara terbanyak juga dianggap memiliki cost politik yang lebih mahal. Hasil wawancara dengan pengurus partai demokrasi Indonesia perjuangan, Bapak Supriyoko:

“Jika setiap dapil meletakkan perempuan di nomor urut 1 atau 2 kemudian sistemnya menggunakan nomor urut, saya yakin bahwa banyak perempuan yang bisa lolos didalam pencalegan. Karena jika dengan sistem suara terbanyak meski perempuan sudah di letakkan di nomor urut 1 namun jika suaranya hanya sedikit maka otomatis tidak akan lolos dan terpilih.” (Wawancara, 22 November 2019).

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden mengenai modal politik yang menjadi salah satu faktor keterwakilan perempuan didalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan bahwa modal politik merupakan modal yang juga berpengaruh dalam keterpilihan.

2.3 Modal Ekonomi (*Economical Capital*)

Modal ekonomi adalah modal yang juga harus dimiliki oleh calon legislatif untuk dapat terpilih dan lolos menjadi anggota DPRD. Dimana modal ekonomi berarti adanya dukungan dana/ finansial yang biasanya berupa materi (Uang) baik itu yang berasal dari Calon Legislatif ataupun dari partai politik dan pihak-pihak lainnya. Cakupan dari modal ekonomi adalah:

a. Kekayaan (finansial. Material)

Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak yang diterapkan dalam pemilu periode kali ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap calon legislatif harus menyiapkan modal ekonomi yang sangat besar. Modal ekonomi tersebut bertujuan untuk

memenuhi *cost* politik. Modal ekonomi ini sebagian besar digunakan sebagai dana kampanye. Sebagai contoh, membuat spanduk sebagai alat kampanye, membayar relawan untuk membantu mengawasi jalannya pemilu, dll. Dimana kampanye tersebut dilakukan sebagai ajang “promosi diri” kepada masyarakat. Caleg akan melakukan berbagai cara untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar mau memilih, terkadang juga caleg memberikan pemberian bantuan kepada masyarakat secara fisik seperti pembuatan lapangan sebagai bentuk kepedulian caleg terhadap masyarakat. Umumnya modal ekonomi berasal dari dana pribadi para caleg, partai hanya membiayai sebagian saja. Bahkan terkadang 100% modal berasal dari caleg. Kebanyakan caleg menggunakan modal ekonomi ini sebagai modal yang memperkuat dari modal sosial tersebut. Modal ekonomi menjadi modal pendukung untuk masyarakat benar-benar memilih caleg tersebut.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai kebangkitan bangsa, Ibu Rahayu Widi Nuryani:

“Ekonomi dan kekayaan, hal ini mau diakui atau tidak memang sangat berpengaruh untuk keterpilihan. Karena sesuai perkembangan zaman, memang saat ini keadaan di masyarakat seperti itu.”(Wawancara, 6 November 2019)

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai nasdem, Ibu Ismi Surtati:

“Diakui atau tidak *cost*/ biaya politik sangat dibutuhkan, siapapun yang akan terjun ke dunia politik tentu harus memiliki modal. Modal tersebut bukan dipergunakan untuk *money* politik tetapi untuk *cost* politik.”(Wawancara, 16 November 2019).

Namun, ada juga caleg yang merasa bahwa modal ekonomi menjadi salah satu modal yang sangat-sangat berpengaruh, dimana caleg tersebut merasa kealahannya disebabkan karena modal ekonomi yang kurang memadai. Caleg tersebut merasa bahwa tanpa adanya modal sosial dan modal politik caleg tetap memiliki peluang untuk menang jika didukung oleh modal ekonomi yang banyak.

Hasil wawancara dengan caleg tidak terpilih dari partai golkar, Ibu Sri Rejeki:

“Modal ekonomi ini yang sangat diperlukan karena jika tidak memiliki modal bagaimana caleg bisa mendapatkan suara yang banyak untuk menang dan terpilih, jika modal ekonomi tinggi namun tidak memiliki basis massa juga bisa menjadi peluang bagi caleg untuk lolos ke DPRD.”(Wawancara, 12 November 2019).

Pendapat yang berbeda diberikan oleh caleg tidak terpilih dari PDIP, Ibu Sri Haryani:

“Menurut saya pribadi modal ekonomi ini jika di persentasekan hanya 15%, karena saya akan menggunakan modal yang lain untuk mendapatkan suara” (Wawancara, 28 November 2019).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa hasil wawancara diatas adalah modal ekonomi ini juga penting, selain adanya jaringan modal ekonomi dibutuhkan karena cost politik yang sangat tinggi. Namun modal ekonomi ini hanya menjadi modal pendukung bagi kedua caleg terpilih. Karena, kedua caleg terpilih tersebut sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat disebabkan karena sudah pernah menjadi anggota DPRD di periode sebelumnya sehingga lebih mengandalkan modal sosial. Sedangkan, Dari satu caleg yang tidak terpilih dalam pemilihan umum, mengatakan bahwa modal ekonomi yang menjadi penyebab caleg tersebut tidak terpilih. Tidak bisa dipungkiri lagi dengan sistem pemilihan umum yang terbuka ini, mengharuskan caleg untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar bisa terpilih. Namun, dengan modal ekonomi yang minim mengakibatkan kecilnya peluang caleg untuk terpilih dan lolos menjadi DPRD. Namun pendapat yang berbeda diberikan oleh caleg dari PDIP dimana narasumber lebih mengandalkan modal yang lain, modal ekonomi menurut narasumber hanya 15% saja jika dibandingkan dari modal-modal lain yang dimiliki.

2.4 Modal Simbolik (Modal Budaya)

Modal yang terakhir adalah modal simbolik atau dikenal juga dengan modal budaya, cakupan dari modal simbolik, yaitu :

a. Gelar pendidikan (tinggi)

Didalam dunia politik tidak ada batasan mengenai gelar pendidikan, setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terjun didunia politik. Namun gelar pendidikan ini kemudian menjadi penting karena, orang yang memiliki gelar pendidikan yang tinggi dianggap lebih berkompenten. Dan masih banyak dari masyarakat yang terkadang memilih caleg melihat dari gelar yang dimiliki, dimana masyarakat tersebut beranggapan bahwa caleg yang memiliki title yang lebih banyak maka memiliki kualitas yang lebih baik. Gelar pendidikan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk memilih caleg, lumrah saja jika masih banyak masyarakat yang merasa bahwa caleg dengan pendidikan tinggi lebih dianggap mampu dibandingkan dengan caleg dengan tingkat pendidikan yang biasa saja. Namun, caleg dengan pendidikan tinggi bukan berarti memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan caleg yang memiliki gelar pendidikan standar. Dapat dilihat juga bahwa masih banyak caleg dengan pendidikan tinggi namun tidak terpilih menjadi anggota legislatif, hal tersebut dikarenakan pendidikan tinggi tersebut tidak didukung oleh modal-modal yang lain. Namun, dari beberapa narasumber yang diwawancarai didalam penelitian ini mayoritas mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak begitu berpengaruh karena pada kenyataannya masih banyak caleg yang tidak memiliki gelar pendidikan yang tinggi namun bisa terpilih dan tidak adanya syarat bahwa caleg harus memiliki gelar pendidikan yang tinggi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai kebangkitan bangsa, Ibu Rahayu Widi

Nuryani:

“Untuk gelar pendidikan menurut saya tidak berpengaruh, karena caleg yang tidak memiliki gelar dan hanya lulusan SMA juga bisa terpilih, untuk citra dan simbol

agama juga tidak begitu berpengaruh karena caleg dengan agama minoritas juga memiliki peluang untuk terpilih.”(Wawancara, 6 November 2019).

Hasil wawancara dengan caleg terpilih dari partai nasdem, Ibu Ismi Surtati:

“Menurut saya modal simbolik ini tidak berpengaruh terhadap terpilihnya saya menjadi anggota legislatif.”(Wawancara, 16 November 2019)

Hasil wawancara dengan caleg tidak terpilih dari partai golkar, Ibu Sri Rejeki:

“Modal ini pengaruhnya sangat kecil di pemilihan legislatif 2019, karena pileg ini adalah pileg yang sangat buruk. Kenyataan yang dapat dilihat dilapangan bahwa ini adalah pileg prahmatis.”(Wawancara, 12 November 2019)

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, modal simbolik tidak memiliki pengaruh yang besar dalam keterwakilan perempuan dan juga keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Namun, terdapat satu responden yang menjadikan modal simbolik sebagai salah satu modal yang dapat diandalkan yaitu Ibu Sri Haryani dari partai PDIP karena caleg ini berprofesi sebagai Dosen dan memiliki gelar pendidikan yang cukup tinggi. Modal simbolik hanya menjadi nilai tambahan untuk beberapa caleg saja.

Hasil wawancara dengan caleg tidak terpilih dari partai PDIP, Ibu Sri Haryani:

“Modal Simbolik ini berpengaruh, terutama pendidikan karena orang yang memiliki pendidikan tinggi pasti bisa berkomunikasi dan membangun jaringan dengan lebih baik.” (Wawancara, 28 November 2019).

Tabel 3.3 Kategorisasi Faktor-Faktor

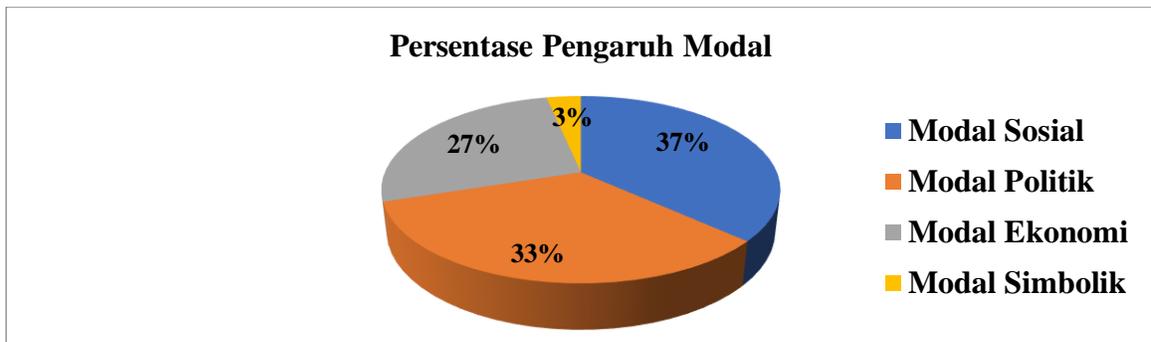
No.	Nama Narasumber	Modalitas	Indikator	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
1.	Rahayu Widi Nuryani, S.H.,M.H	Modal sosial (social capital)	Jaringan dalam dan luar negeri	√	
			Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll)	√	
			Keturunan (Bangsawan, penguasa)		√
			Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√	
			Pengurus organisasi besar dan terhormat		√
		Modal politik (political capital)	Jabatan politik		√
			Pengalaman mengorganisasi massa	√	
		Keturunan (bangsawan, penguasa)		√	

			Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik	√	
			Reputasi dan legitimasi	√	
		Modal ekonomi (economical capital)	Kekayaan (finansial, material)	√	
			Keturunan (bangsawan, penguasa)		√
			Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√	
			Kelas menengah santri		√
			Birokrat pemerintahan		√
		Modal Simbolik (modal budaya)	Gelar pendidikan (tinggi)		√
			Citra dan simbol agama		√
			Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural		√
2.	Hj. Ismi Sutarti,S.H	Modal sosial (social capital)	Jaringan dalam dan luar negeri	√	
			Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll)		√
			Keturunan (Bangsawan, penguasa)		√
			Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√	
			Pengurus organisasi besar dan terhormat		√
		Modal politik (political capital)	Jabatan politik		√
			Pengalaman mengorganisasi massa	√	
			Keturunan (bangsawan, penguasa)		√
			Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik		√
			Reputasi dan legitimasi	√	
		Modal ekonomi (economical capital)	Kekayaan (finansial, material)	√	
			Keturunan (bangsawan, penguasa)		√
			Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√	
			Kelas menengah santri		√
			Birokrat pemerintahan		√
		Modal Simbolik (modal budaya)	Gelar pendidikan (tinggi)		√
			Citra dan simbol agama		√
			Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural		√
3.	Dra. Hj. Sri Haryani,M.Si	Modal sosial (social capital)	Jaringan dalam dan luar negeri	√	
			Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll)	√	

			Keturunan (Bangsawan, penguasa)		√	
			Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√		
			Pengurus organisasi besar dan terhormat	√		
		Modal politik (political capital)	Jabatan politik		√	
			Pengalaman mengorganisasi massa	√		
			Keturunan (bangsawan, penguasa)		√	
			Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik	√		
			Reputasi dan legitimasi	√		
		Modal ekonomi (economical capital)	Kekayaan (finansial, material)	√		
			Keturunan (bangsawan, penguasa)		√	
			Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√		
			Kelas menengah santri		√	
			Birokrat pemerintahan		√	
		Modal Simbolik (modal budaya)	Gelar pendidikan (tinggi)	√		
			Citra dan simbol agama		√	
			Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural		√	
4.	Sri Rejeki Rahayuningsih,S.H	Modal sosial (social capital)	Jaringan dalam dan luar negeri	√		
			Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll)		√	
			Keturunan (Bangsawan, penguasa)		√	
			Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√		
			Pengurus organisasi besar dan terhormat		√	
			Modal politik (political capital)	Jabatan politik		√
				Pengalaman mengorganisasi massa	√	
				Keturunan (bangsawan, penguasa)		√
				Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik	√	
				Reputasi dan legitimasi		√
			Modal ekonomi (economical capital)	Kekayaan (finansial, material)	√	
				Keturunan (bangsawan, penguasa)		√
				Kekuatan pengaruh dalam masyarakat	√	

			Kelas menengah santri		√
			Birokrat pemerintahan		√
		Modal Simbolik (modal budaya)	Gelar pendidikan (tinggi)		√
			Citra dan simbol agama		√
			Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural		√

Tabel diatas menunjukkan indikator-indikator dari teori modalitas yang berpengaruh dan tidak berpengaruh yang didapatkan dari narasumber dalam penelitian ini. Jika di persentasekan modal-modal yang berpengaruh pada keterpilihan caleg dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman yaitu:



Gambar 3.4 Persentase Pengaruh Modal

Setelah diakumulasikan dari hasil wawancara dengan beberapa caleg yang dipilih sebagai responden dapat ditarik kesimpulan bahwa, modal satu dengan modal lainnya saling berkaitan. Caleg tidak akan lolos dan terpilih menjadi anggota DPRD jika hanya memiliki satu modal saja atau dua modal saja, karena modal tersebut saling melengkapi. Seorang caleg tidak akan bisa lolos jika hanya memiliki modal sosial saja, harus didukung oleh modal politik dan juga modal ekonomi. Jika diurutkan berdasarkan data diatas, maka:

1. Modal sosial
2. Modal politik
3. Modal ekonomi
4. Modal simbolik